

PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN **DATA DAN INFORMASI**

- REKALKULASI
- DEFORESTASI
- PIPPIB
- NSDH
- INVENTARISASI HUTAN NASIONAL
- PERATURAN PEMANTAUAN SDH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan booklet Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan Indonesia dengan baik. Booklet ini merupakan salah satu bentuk publikasi ringkas untuk menyebarluaskan data dan informasi pemantauan sumber daya hutan Indonesia, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

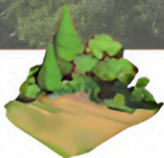
Data dan informasi yang termuat dalam booklet ini antara lain penutupan lahan Indonesia, deforestasi Indonesia, kebijakan penghentian pemberian izin baru sebagai penyempurnaan kebijakan moratorium pada hutan alam primer dan lahan gambut, Neraca Sumber Daya Hutan serta Inventarisasi Hutan Nasional. Data dan informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran umum kondisi hutan di Indonesia serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan dan pembangunan kehutanan, sekaligus sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan booklet ini. Kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan booklet ini. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Penyusun

PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

1.



**REKALKULASI
PENUTUPAN
LAHAN**

2.



DEFORESTASI

3.



PIPPIB

4.



NSDH

5.



**INVENTARISASI
HUTAN NASIONAL**

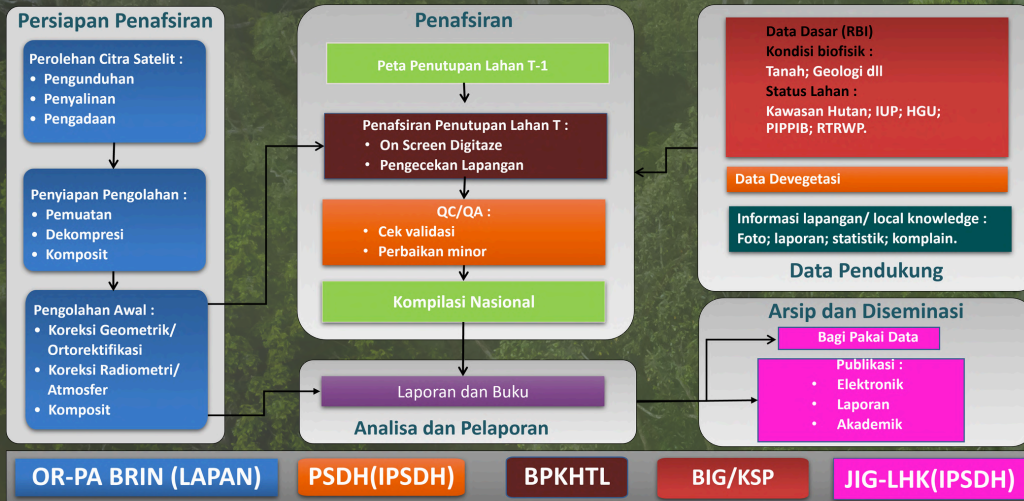
6.



**PERATURAN
PEMANTAUAN SDH**

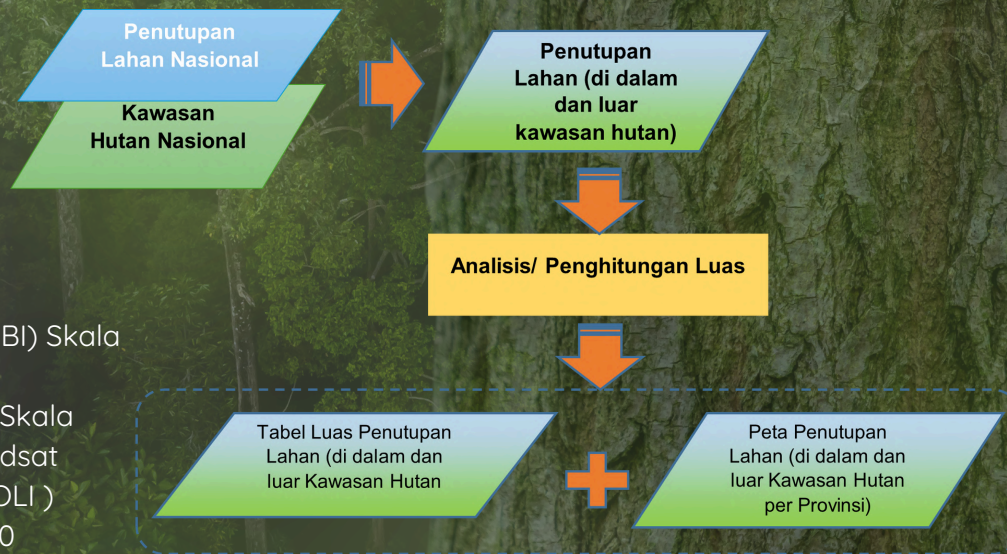
REKALKULASI PENUTUPAN LAHAN

METODE (MONITORING HUTAN/PENUTUPAN LAHAN)

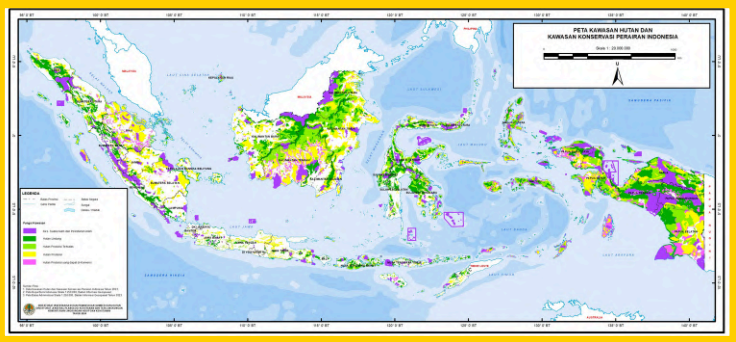


Sumber data :

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:250.000
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023 Skala 1:250.000 (hasil penafsiran citra Landsat Data Continuity Mission/Landsat 8 OLI)
- Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000



Bagan Alur Proses Rekalkulasi Penutupan Lahan



Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan



Peta Penutupan Lahan Tahun 2023

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDONESIA									
A.	Hutan	17.581,0	24.043,7	21.868,0	19.171,9	82.664,6	5.694,9	88.359,5	7.871,8	96.231,4
	- Hutan Primer	11.715,7	15.501,7	9.401,1	4.640,3	41.258,8	2.212,7	43.471,5	1.683,1	45.154,6
	- Hutan Sekunder	5.759,5	8.290,6	12.059,9	10.361,8	36.471,8	3.448,3	39.920,1	5.607,8	45.527,9
	- Hutan Tanaman *	105,9	251,3	407,1	4.169,8	4.934,1	33,9	4.968,0	580,9	5.548,9
B.	Non Hutan	4.263,4	5.252,2	4.918,6	10.006,5	24.440,9	5.392,8	29.833,7	61.873,6	91.707,3
	Total	21.844,5	29.295,9	26.786,6	29.178,5	107.105,5	11.087,7	118.193,2	69.745,5	187.938,7

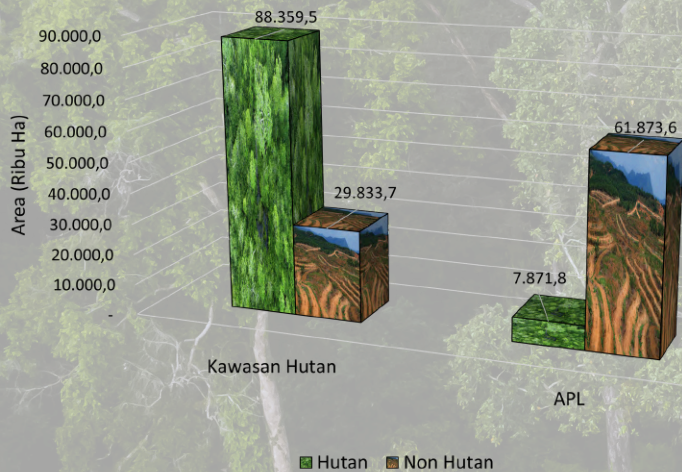
Catatan HK: Hutan Konservasi; HL: Hutan Lindung; HPT: Hutan Produksi Terbatas; HP: Hutan Produksi Tetap; HPK: Hutan yang dapat diKonversi; APL: Areal Penggunaan Lain (non kawasan hutan)

* Hutan tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah kelas penutupan lahan yang merupakan hasil budidaya manusia meliputi seluruh hutan tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya (SNI 8033:2014, Metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optis secara visual)

Indonesia memiliki luas daratan seluas 187,9 juta ha yang terdiri dari lahan berhutan seluas 96,2 juta ha (51,2%) dan lahan tidak berhutan seluas 91,7 juta ha (48,8%).

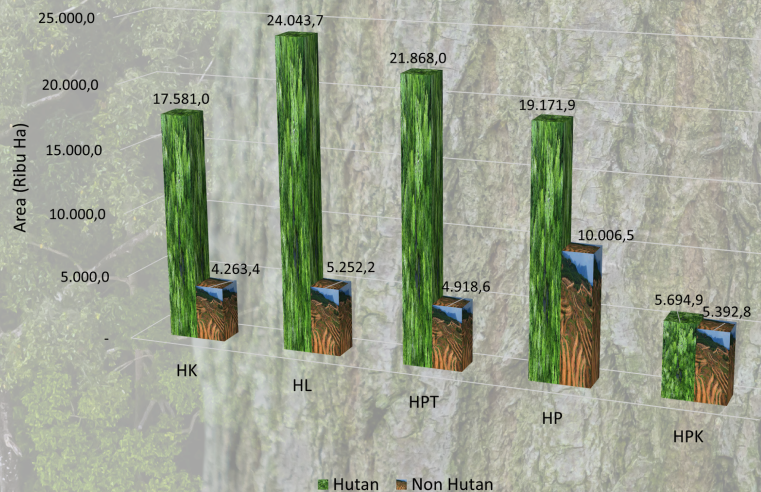


Diagram Penutupan Lahan (hutan dan tidak berhutan) Indonesia di dalam dan di luar Kawasan Hutan (APL)



Luas penutupan lahan di dalam kawasan hutan daratan terdiri dari: 88,6 juta ha (74,8%) masih berhutan dan 29,8 juta ha (25,2%) merupakan lahan tidak berhutan (non hutan).

Diagram Penutupan Lahan (hutan dan tidak berhutan) Indonesia per Fungsi Kawasan Hutan



Berdasarkan fungsi kawasan, penutupan lahan berhutan terbesar terdapat pada fungsi Hutan Lindung seluas 24,0 juta ha (27,2 %).

PENUTUPAN LAHAN BERHUTAN PADA 7 (TUJUH) KELOMPOK
PULAU/KEPULAUAN BESAR (RIBU HA)

NO.	PULAU/KEPULAUAN	KAWASAN HUTAN								APL		TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	%	LUAS	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	SUMATERA	3.908,1	3.761,6	1.246,8	3.953,8	12.870,4	182,2	13.052,6	13,6	1.095,1	1,1	14.147,7
2	JAWA	440,1	504,4	319,9	1.114,0	2.378,4	0,0	2.378,4	2,5	400,8	0,4	2.779,2
3	KALIMANTAN	3.864,1	5.903,7	9.113,6	6.032,7	24.914,1	586,4	25.500,5	26,5	2.420,4	2,5	27.921,0
4	SULAWESI	1.513,3	3.526,7	2.473,9	737,7	8.251,5	167,1	8.418,7	8,7	833,8	0,9	9.252,5
5	BALI NUSA	265,6	875,3	326,5	254,1	1.721,5	20,8	1.742,2	1,8	948,1	1,0	2.690,3
6	MALUKU	586,1	1.006,6	1.341,5	816,9	3.751,2	1.126,1	4.877,3	5,1	287,3	0,3	5.164,6
7	PAPUA	7.003,8	8.465,4	7.045,7	6.262,6	28.777,6	3.612,2	32.389,8	33,7	1.886,4	2,0	34.276,1
	TOTAL	17.581,0	24.043,7	21.868,0	19.171,9	82.664,6	5.694,9	88.359,5	91,8	7.871,8	8,2	96.231,4

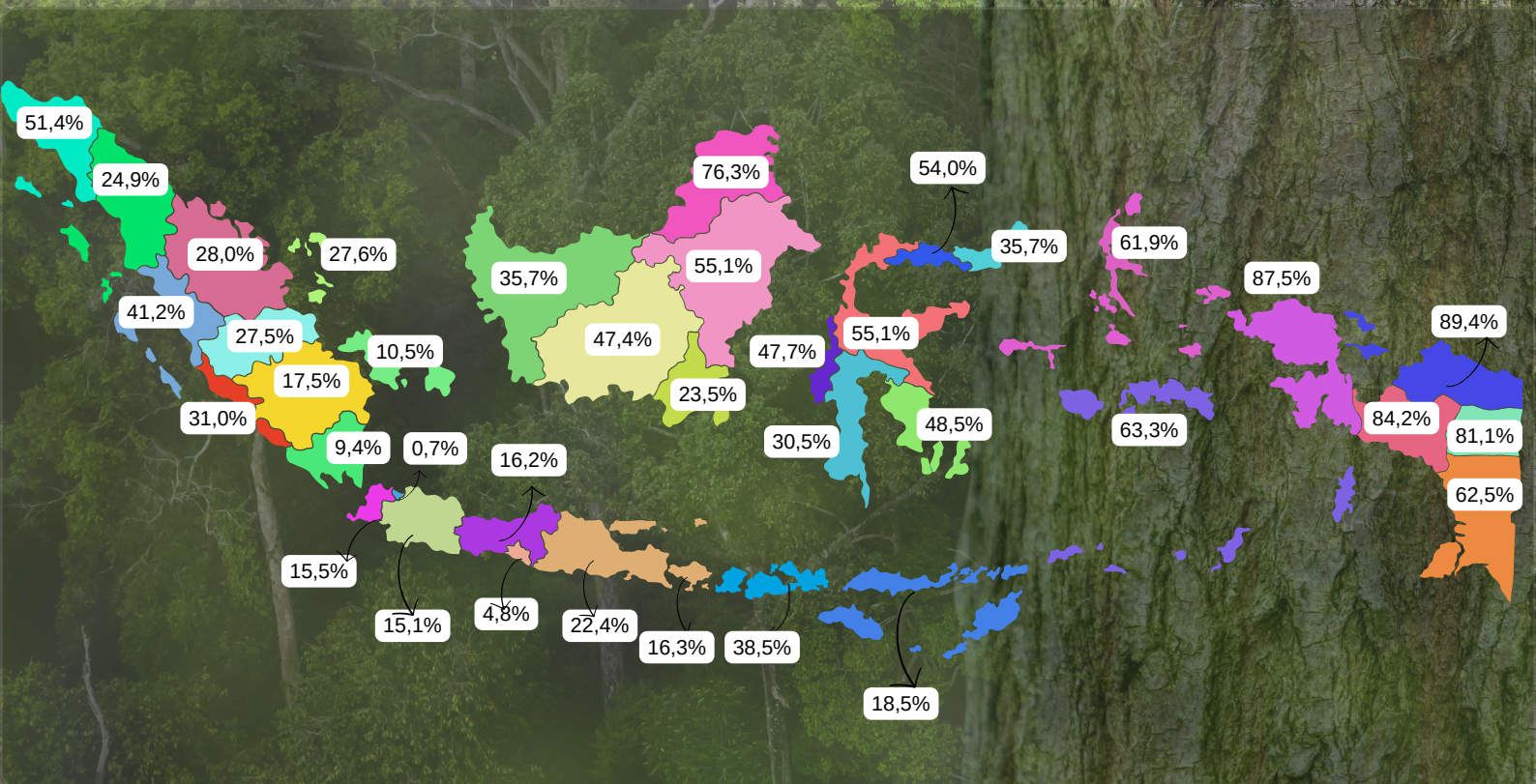
Kelompok Pulau Papua memiliki luas terbesar penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan daratan yaitu 32,3 juta ha atau 33,7% dari luasan total lahan berhutan di daratan Indonesia sebesar (96,2 juta ha), diikuti dengan Kelompok Pulau Kalimantan seluas 25,5 juta ha (26,5%), sedangkan luas terkecil adalah Kelompok Pulau Bali dan Nusa Tenggara seluas 1,7 juta ha (1,8%).

Areal Berhutan di Dalam Kawasan Hutan pada
7 Kelompok Pulau/Kepulauan Besar Tahun 2023 (RibU Ha)

PULAU	Area Berhutan pada Kawasan Hutan	Daratan	%
SUMATERA	12.857,1	47.076,9	27,3
JAWA	2.349,2	13.394,3	17,5
KALIMANTAN	25.229,2	52.990,4	47,6
SULAWESI	8.378,7	18.446,6	45,4
BALI NUSA	1.751,2	7.306,9	24,0
MALUKU	3.705,5	7.775,2	47,7
PAPUA	32.441,3	40.948,3	79,2

Persentase Areal Berhutan di Dalam Kawasan
Hutan pada 7 Kelompok Pulau/Kepulauan
Besar Tahun 2023

PERSENTASE PENUTUPAN LAHAN BERHUTAN DI DALAM KAWASAN HUTAN TERHADAP LUAS DARATAN PER PROVINSI TAHUN 2023



DEFORESTASI INDONESIA

Penghitungan deforestasi Indonesia telah dilakukan secara periodik dimulai dari periode pengamatan tahun 1990 hingga sekarang. Dalam setiap periode, angka deforestasi mengalami peningkatan maupun pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman.



Bagan Alur Proses Penghitungan Deforestasi

Sumber Data:

- Peta RBI Skala 1:250.000
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022 - 2023 Skala 1:250.000 (hasil penafsiran citra Landsat Data Continuity Mission/Landsat 8 OLI)
- Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000

Penting untuk menjadi perhatian bahwa informasi deforestasi meliputi deforestasi brutto reforestasi, dan deforestasi netto, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memahami metode dan informasi yang tersaji.

Deforestasi (Bruto) :

Perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan berhutan menjadi kelas penutupan lahan tidak berhutan, baik yang terjadi pada hutan alam maupun hutan tanaman (tanpa memperhitungkan reforestasi yang terjadi)

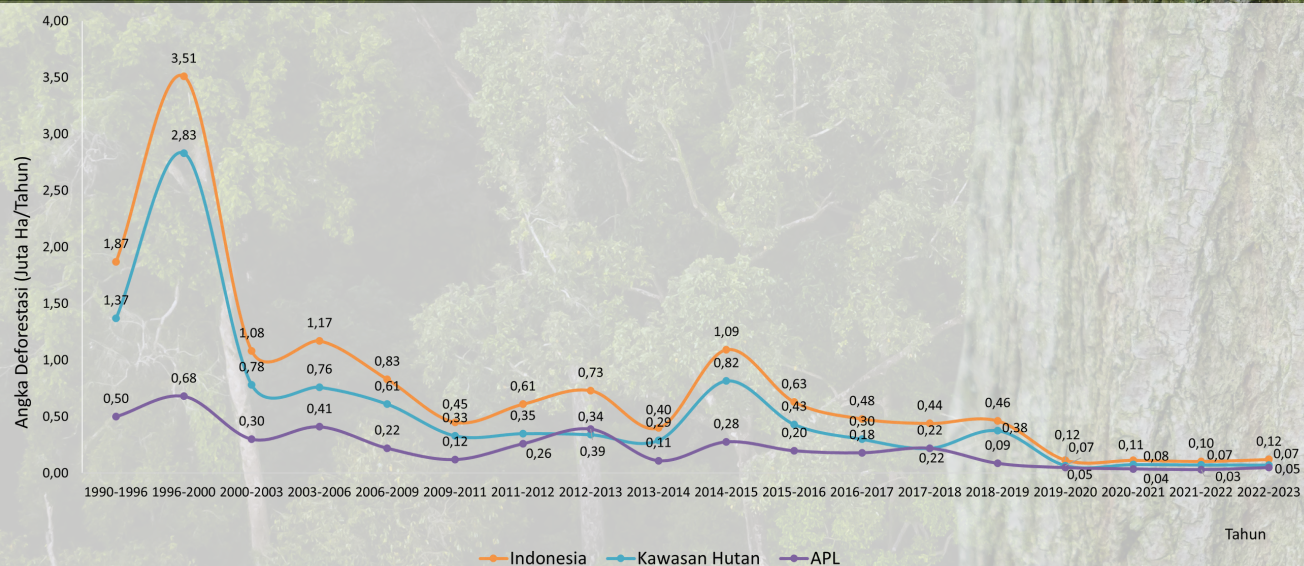
Reforestasi :

Perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan tidak berhutan menjadi kelas penutupan lahan berhutan.

Deforestasi (Netto) :

Perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi brutto dikurangi dengan luas reforestasi.

DEFORESTASI (NETTO) = DEFORESTASI (BRUTO) - REFORESTASI

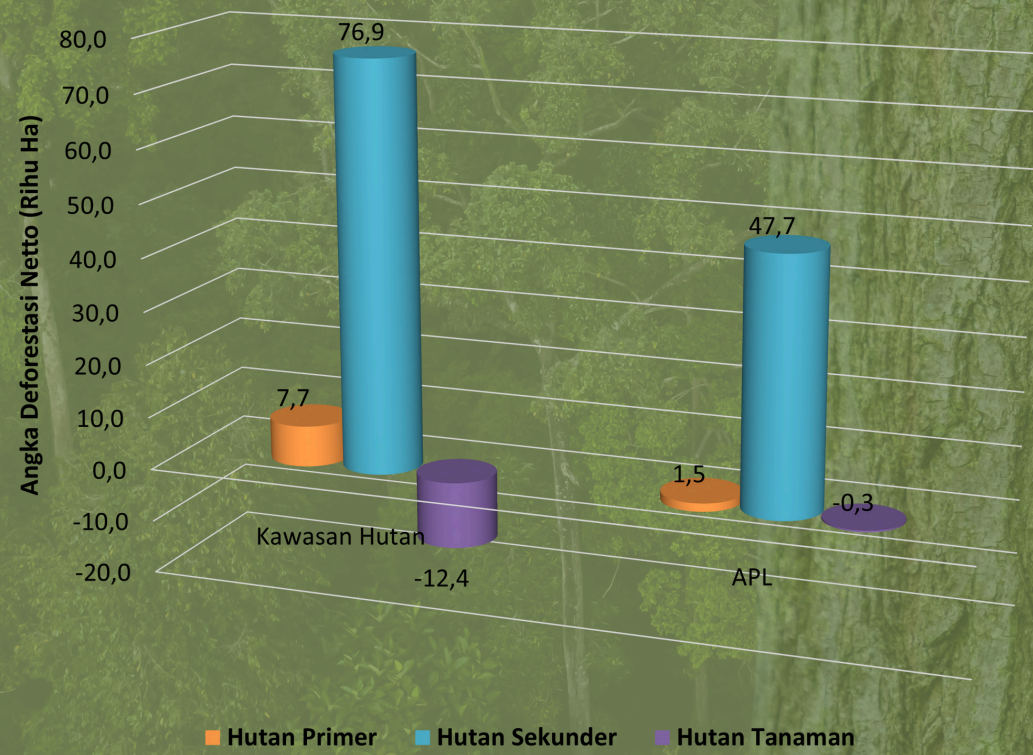


Penyajian luas deforestasi sejak periode tahun 2011-2012 merupakan hasil penghitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan besaran reforestasi. Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan deforestasi brutto. Deforestasi tertinggi terjadi pada kurun waktu tahun 1996-2000 dan terlihat adanya penurunan pada periode-periode selanjutnya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka deforestasi Netto Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 121,1 ribu ha. Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya maka tahun ini terjadi sedikit kenaikan namun tetap lebih rendah daripada rata-rata deforestasi sepuluh tahun terakhir terutama jika dibandingkan dengan kejadian elnino pada tahun 2015 dan 2019 yang kurang lebih sama dengan tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang signifikan antara lain: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

DEFORESTASI INDONESIA (RIBU HA) TAHUN 2023

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
	TIPE HUTAN	HUTAN TITAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDONESIA									
	A. Hutan Primer	857,5	1849,5	2.850,2	1.889,8	7.447,0	248,4	7.695,4	1.539,1	9.234,5
	B. Hutan Sekunder	3.640,7	4.224,0	15.112,6	48.418,3	71.395,6	5.507,5	76.903,1	47.695,8	124.598,9
	C. Hutan Tanaman*	9,8	28,2	501,1	12.006,0	12.488,8	54,8	12.434,0	295,9	12.729,9
	TOTAL	4.498,4	6.101,7	17.461,6	30.302,1	66.353,0	5.810,7	72.164,5	48.939,0	121.103,5

Deforestasi Indonesia tahun 2023 sebesar 121,1 ribu ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 145,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 24,3 ribu ha. Luas deforestasi bruto tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 132,1 ribu ha (90,8 %), di mana 63,8% atau 84,3 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 47,8 ribu ha atau 36,2 % berada di luar kawasan hutan.



PETA DEFORESTASI INDONESIA TAHUN 2023

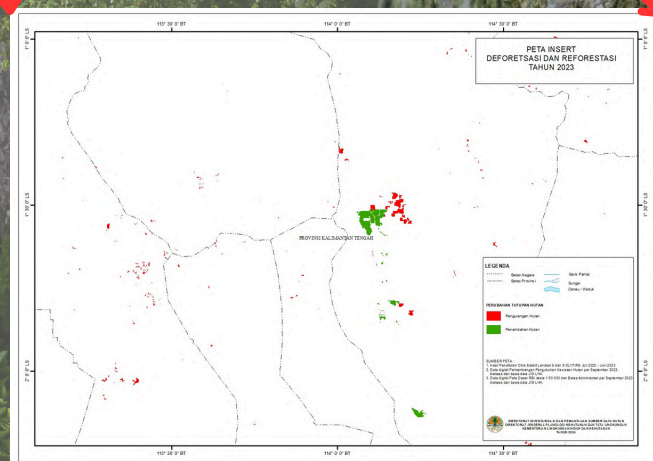
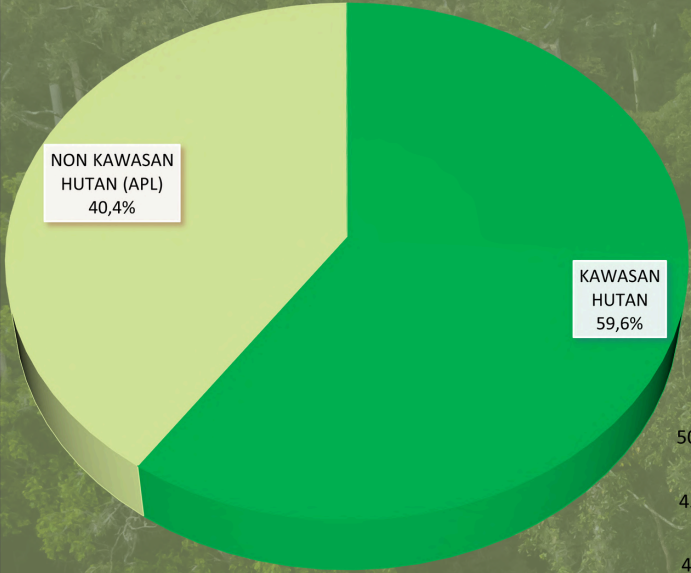
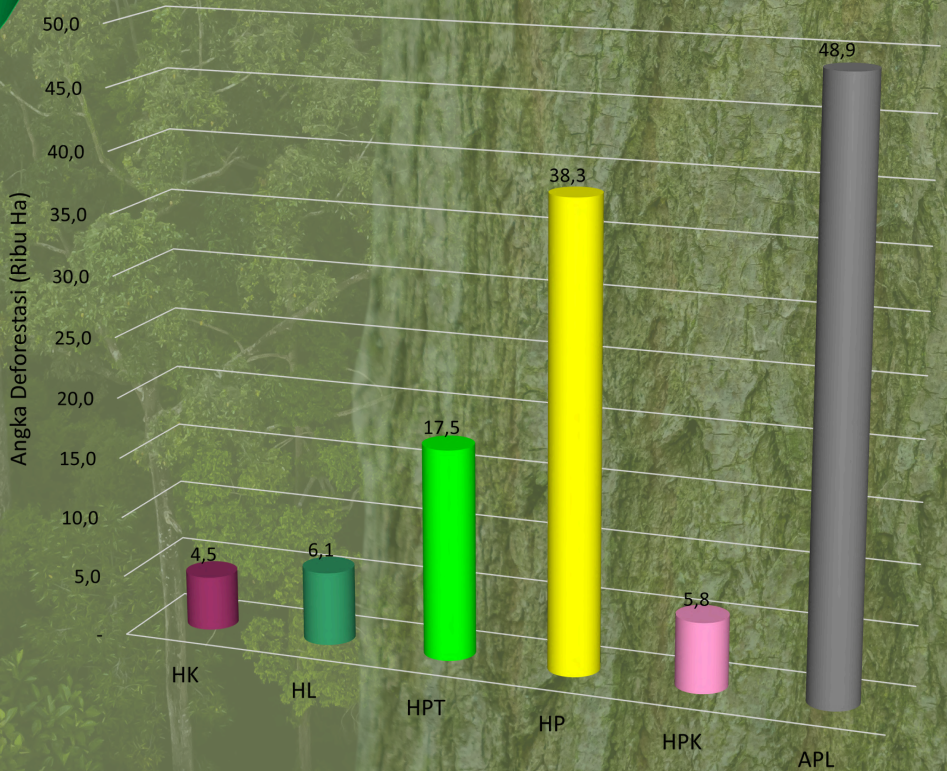


Diagram Angka Deforestasi Netto
Indonesia Tahun 2023



Deforestasi di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
Tahun 2022-2023 (Ribu Ha)

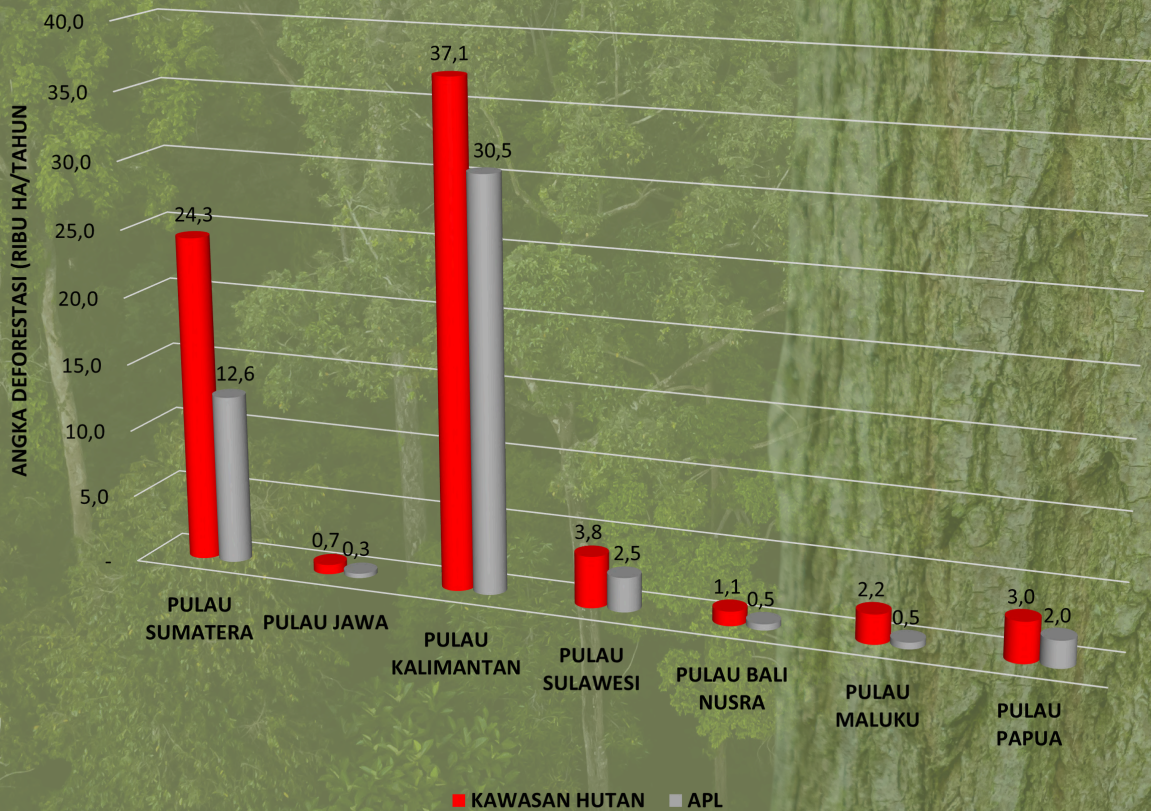
NO.	FUNGSI KAWASAN	LUAS DEFORESTASI NETTO	
		Luas (Ribu Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi (HK)	4,5	3,7
2	Kawasan Hutan Lindung	6,1	5,0
3	Kawasan Hutan Produksi		
	a. HPT	17,5	14,4
	b. HP	38,3	31,6
	c. HPK	5,8	4,8
	sub Total	61,6	50,8
	Total Kawasan Hutan (1+ 2 + 3)	72,2	59,6
4	Areal Penggunaan Lain	48,9	40,4
	Total Deforestasi (1+ 2 + 3 + 4)	121,1	100,0



Pada tahun 2023, deforestasi tertinggi terjadi pada Areal Penggunaan lainnya (APL) sebesar 48,9 ribu ha dibandingkan dengan fungsi kawasan lainnya.

DEFORESTASI NETTO PADA 7 (TUJUH) KELOMPOK PULAU/KEPULAUAN BESAR DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (RIBU HA)

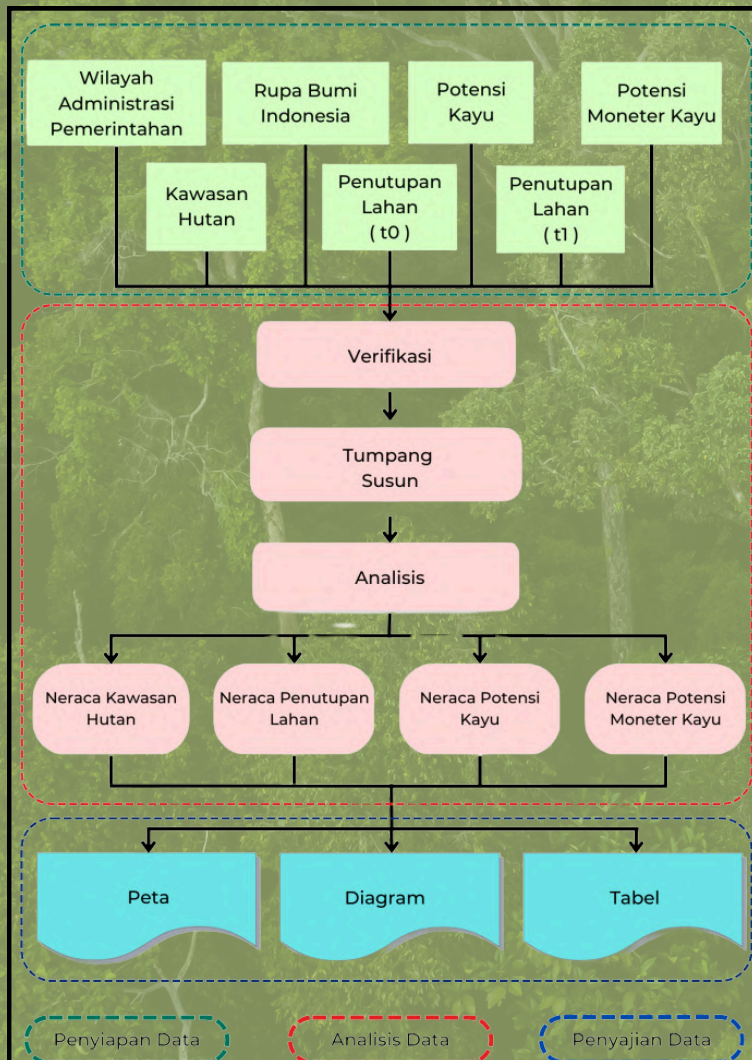
NO.	PROVINSI	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	PULAU SUMATERA	4,8	4,5	9,1	3,7	22,2	2,1	24,3	12,6	36,9
2	PULAU JAWA	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	-	0,7	0,3	1,0
3	PULAU KALIMANTAN	0,8	0,5	5,6	30,6	35,0	2,1	37,1	30,5	67,6
4	PULAU SULAWESI	0,1	0,9	1,4	1,0	3,6	0,3	3,8	2,5	6,4
5	PULAU BALI NUSRA	0,0	0,3	0,1	0,6	1,1	0,0	1,1	0,5	1,5
6	PULAU MALUKU	0,0	0,1	0,6	0,8	1,5	0,7	2,2	0,5	2,7
7	PULAU PAPUA	0,2	0,6	0,6	1,0	2,4	0,6	3,0	2,0	5,0
Total		4,5	6,1	17,5	38,3	66,4	5,8	72,2	48,9	121,1



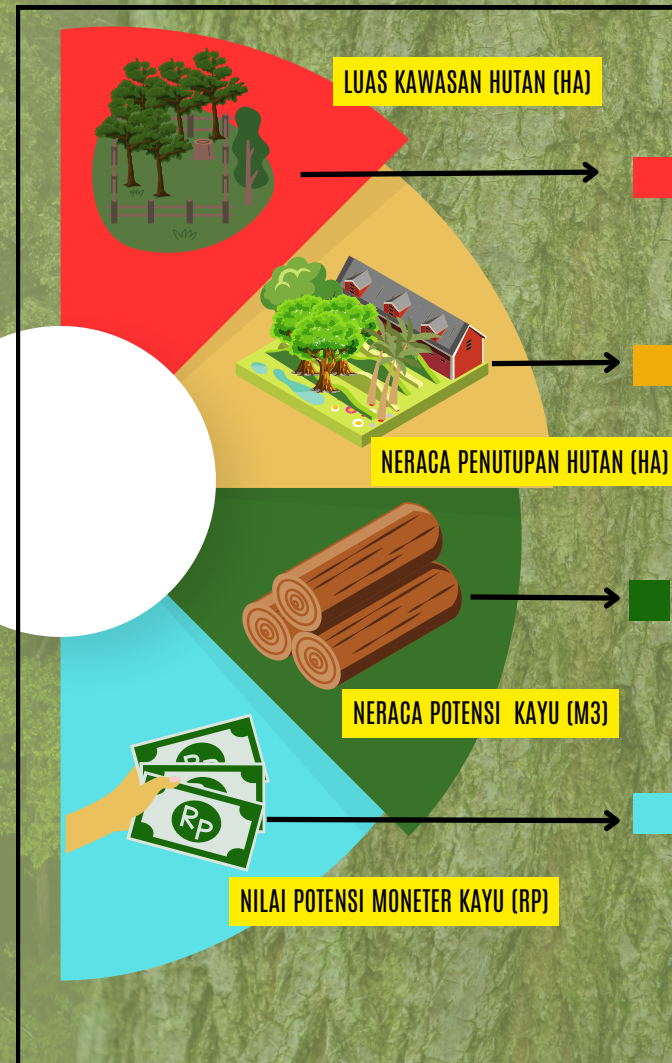
NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH)

Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan, kehilangan dan penambahan sumber daya hutan sebagai akibat aktivitas pengelolaan hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya apakah surplus atau defisit dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

ALUR PROSES PERHITUNGAN NSDH



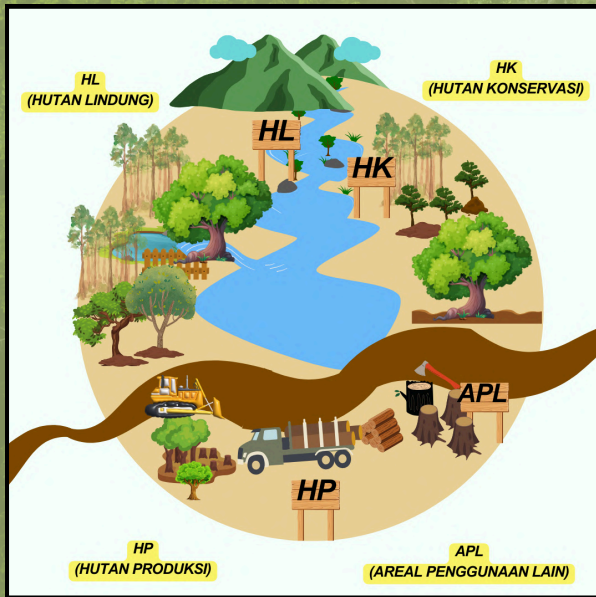
DATA NSDH



NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH)

NSDH tahun 2024 berarti menyajikan dan membandingkan data dan informasi yang berkaitan tentang neraca kawasan hutan, neraca penutupan hutan, neraca potensi kayu dan neraca potensi moneter kayu pada tahun 2022 dengan tahun 2023. Penyajian data tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan hutan yang terdiri dari hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi (HP) dan area di luar kawasan hutan atau biasa disebut dengan area penggunaan lain (APL).

RUANG LINGKUP NSDH



DATA NSDH 2024

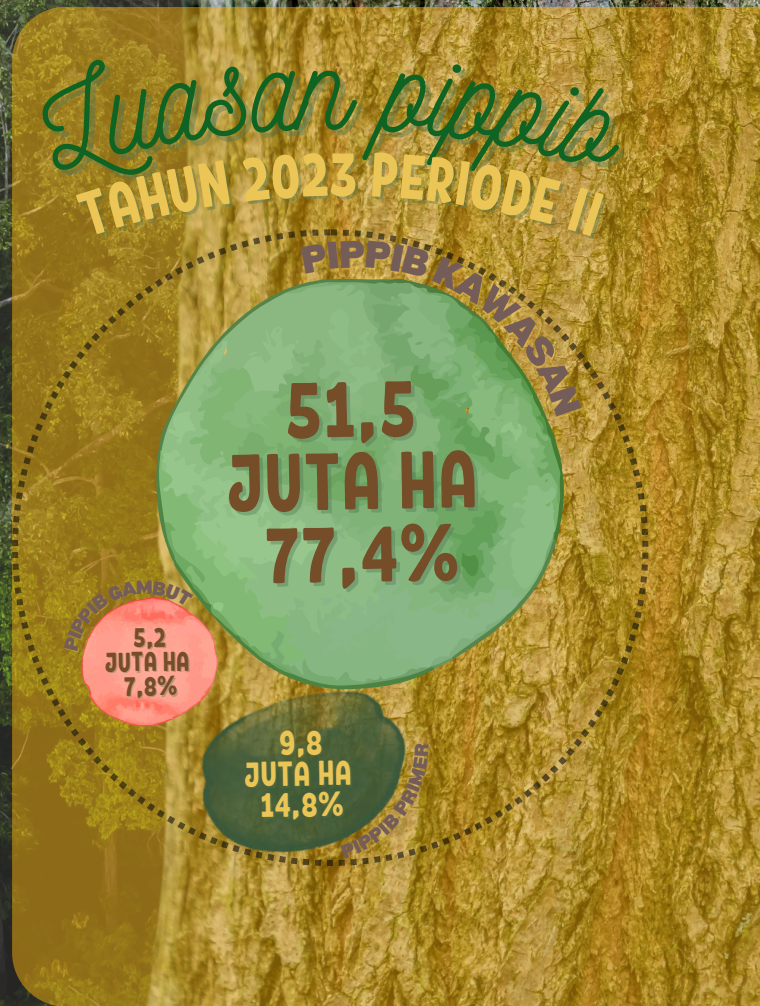
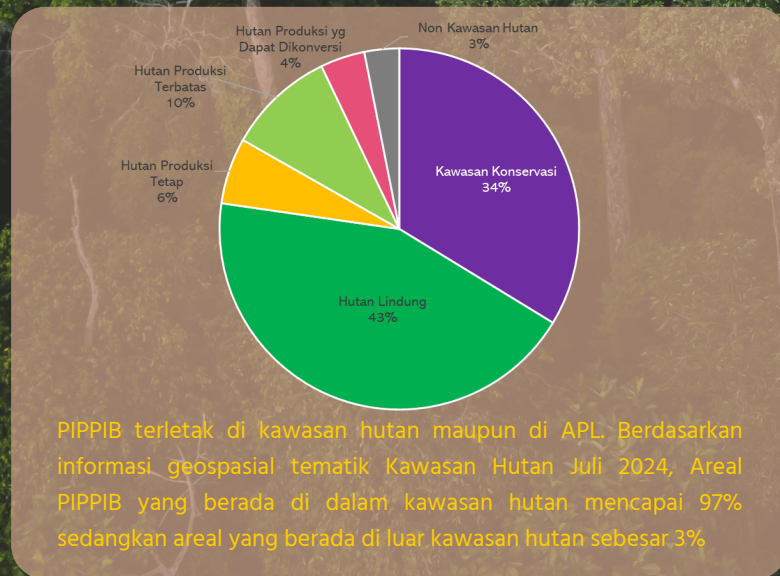


Catatan:

- ✔ Angka atau nilai bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan pembaharuan atau peningkatan akurasi data.
- ✔ Potensi kayu merupakan potensi kayu dari tutupan hutan dan potensi kayu dari tutupan vegetasi berkayu.

PIPIB

PIPIB merupakan amanah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. PIPPIB terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor SK. SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Tahun 2023 Periode II



INVENTARISASI HUTAN NASIONAL

Sejarah



Era Kolonial - 1980an

Pengelolaan hutan dimulai pada era penjajahan Belanda, dengan fokus pengelolaan hutan tanaman di Pulau Jawa. Sedangkan pengelolaan hutan di luar Jawa baru dimulai pada akhir tahun 1970-an. Saat itu, kepentingan nasional terhadap hutan masih erat kaitannya dengan produksi kayu dan pemanfaatan lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.



Akhir tahun 1980an - 1996

- Pada tahun 1989, NFI yang didanai oleh Bank Dunia dilaksanakan oleh FAO bersama Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan) mulai dilakukan termasuk pengembangan dan implementasinya.
- Proyek NFI bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Departemen Kehutanan dalam melakukan inventarisasi hutan untuk menghasilkan data dan informasi sumber daya hutan.
- Sistem NFI yang dibangun meliputi : penilaian sumber daya hutan-FRA untuk memantau status hutan melalui pengembangan petak contoh sementara (TSP), (2) pemantauan sumber daya hutan-FRM untuk memantau perubahan hutan melalui pengembangan petak contoh permanen (PSP), (3) GIS dan (4) layanan pengguna.
- Desain pengambilan sampel menggunakan metode single-stage systematic sampling with post-stratification. Pendistribusian klaster dilakukan sistematis pada grid berukuran 20 km atau dapat dirinci jika diperlukan.
- Sebanyak 2.735 plot klaster telah diukur selama periode 1990 hingga 1996, dengan rincian Kalimantan (1.025 klaster), Sumatra (695 klaster) dan Irian Jaya (437 klaster).



1997 - 2024

Penerapan NFI lama (Enumerasi Reenumerasi TSP PSP) dilakukan dengan sumber anggaran dari Pemerintah (DIPA). Metode yg digunakan masih menggunakan metode yang dibuat FAO pada tahun 1990an dengan parameter yang diukur fokus pada potensi tegakan. Satuan biaya yang digunakan pada NFI lama dirasakan cukup besar, dikarenakan plot ukur klaster yang berukuran 1 ha.



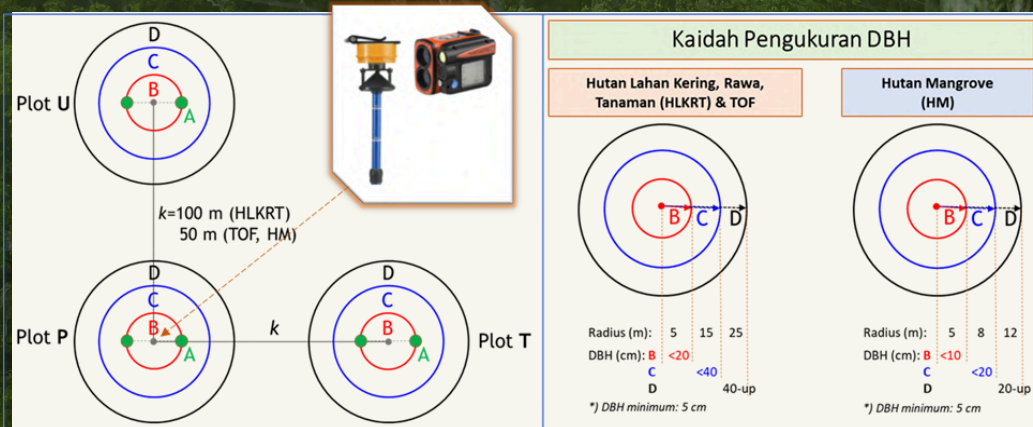
Pengembangan Selanjutnya

Dengan perkembangan peraturan yang ada, kebutuhan akan data dan informasi yang akurat dan terpercaya, pemanfaatan teknologi serta pertimbangan efisiensi dan efektifitas kegiatan, metode NFI lama memerlukan redesign ulang. Mulai Tahun 2020, FAO dan KLHK telah mengembangkan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) metode baru yang diperkenalkan dengan "IHN2.0" yang akan diaplikasikan mulai Tahun 2025.

IHN 2.0

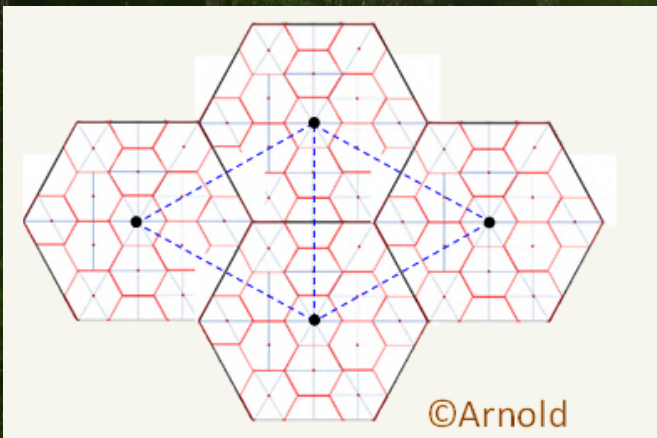
Klaster-plot lebih efisien:

- Ukuran kecil => max. 0.6 ha (3 x 0.2 ha)
- Nested-subplots => pohon kecil, sedang, besar
- Berlaku untuk hutan lahan kering, rawa, tanaman, mangrove, TOF (Trees Outside Forest, Pepohonan Di Luar Hutan (PDLH))

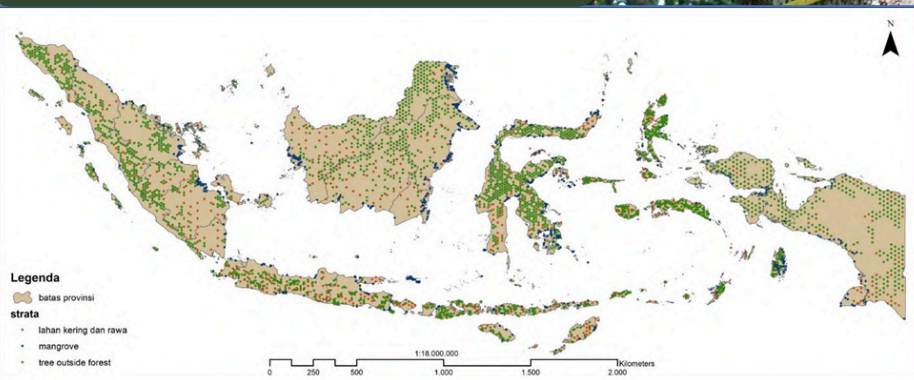


Distribusi

Systematic aligned : grid hexagon



Sebaran Kluster IHN 2.0



Total: 3632 klaster

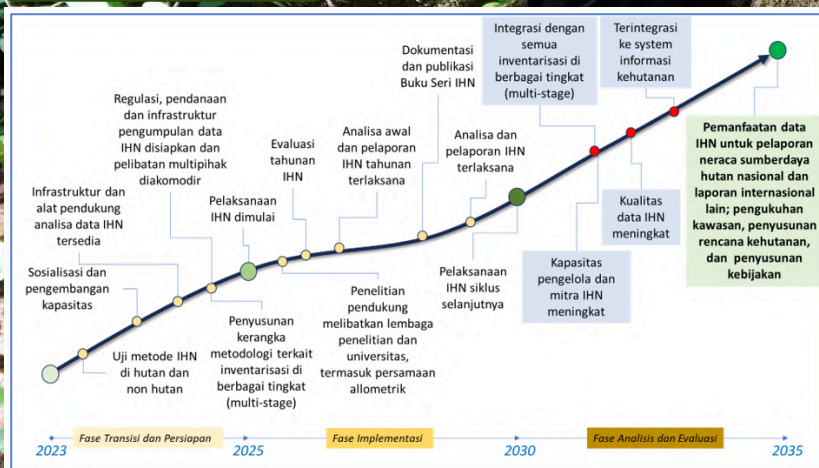
- HLKRT: 2512 klaster (69%)
- TOF: 517 klaster (14%)
- Mangrove: 603 klaster (17%)



Pelaksanaan IHN 2.0 dalam Sistem Panel 5 tahunan

Stratum	Panel 1	Panel 2	Panel 3	Panel 4	Panel 5	Total
HLKRT	199	638	640	640	395	2512
TOF/PDLH	67	143	152	146	95	603
Mangrove	99	119	108	114	77	517
Total	365	900	900	900	567	3632
Persentase (%)	10	25	25	25	15	100

Peta Jalan IHN 2.0



PERATURAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Dokumentasi Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan memiliki peranan penting dalam mempertahankan keberadaan dan ketersediaan dokumen hasil Pemantauan Sumber Daya Hutan yang dapat berupa data lapangan atau data hasil analisis periodik, aturan/kebijakan beserta lampiran peta dan buku/laporan. Dokumen tersebut selanjutnya dapat dipublikasikan sebagai bagian dari penyampaian informasi publik serta dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan kebijakan nasional.

PERATURAN TERKAIT PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. P.1/VII-IPSDH/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan.
- Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1/2017 Tanggal 26 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).
- Peraturan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor: Juknis.1/IPSDH/PSDH/PLA.1/7/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengecekan Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Untuk Menghasilkan Data Penutupan Lahan
- Peraturan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Untuk Update Data Penutupan Lahan Nasional Nomor : Juknis 1/PSDH/PLA.1/7/2020 Tanggal 6 Juli 2020.
- Peraturan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tentang Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Untuk Menghasilkan Data Penutupan Lahan Skala 1:50.000 pada Areal Unit Pengelola Nomor: Juknis 1/PSDH/PLA.1/8/2021 Tanggal 9 Agustus 2021.



Diterbitkan :

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7

Jl. Jenderal Gatot Subroto Senayan - Jakarta 10270

Email: simontana@menlhk.go.id

Telp. (021) 5730335-5730292

Fax. (021) 5730335